

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menalankan pemerintahan diukur melalui pencapaian kinerja. Kinerja Pegawai adalah suatu prestasi yang telah dicapai oleh pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Agar dapat mencapai tujuan dari organisasi, diperlukan kualitas kinerja yang baik dari para anggotanya, sehingga organisasi perlu untuk meningkatkan kinerja para anggotanya. Kinerja pegawai dapat diukur dari hasil kerja atau hasil kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Untuk kemajuan organisasi, pimpinan harus memperhatikan peningkatan kinerja pegawai karena kinerja pegawai yang tinggi dapat mendukung produktivitas dalam organisasi tersebut.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah menetapkan otonomi daerah sebagai upaya penataan pemerintahan, mengelola administrasi publik serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penataan pemerintahan yang baik mengharuskan pengelolaan pemerintahan dilaksanakan secara transparansi dan tanggung jawab. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan menjadikan pemerintah harus dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dengan baik. Pemerintah bertugas memberikan pelayanan untuk menyejahterakan rakyat dengan sistem yang adil,

baik, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Penetapan otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan melaksanakan pemerintahan pada suatu wilayah. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah merupakan suatu organisasi pada tingkatan pemerintah daerah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Perangkat daerah di provinsi terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, serta lembaga teknis daerah. Pemerintah yang menyadari bahwa penerapan *good governance* tidak dapat terwujud tanpa adanya *good public governance* dan partisipasi dari masyarakat. Salah satu perangkat daerah yang terdapat pada tingkatan provinsi adalah dinas daerah. Kepala dinas memberikan pertanggungjawabannya kepada sekretaris daerah mengenai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pencatatan tugas Dinas Daerah.

Tuntutan publik terhadap pemerintah daerah terhadap amanah yang diberikan adalah suatu bentuk kepedulian masyarakat yang harus direspon baik oleh pemerintah. Fenomena ini juga terjadi pada dinas daerah. Dinas daerah sebagai organisasi sektor publik harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik memerlukan sinergi antara tiga komponen utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Menurut *World Bank* dalam Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa tata pemerintahan atau *good governance* adalah suatu pelaksanaan manajemen dalam Pembangunan yang solid dan bertanggungjawab. Implementasi *good governance* bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelaksanaan pemerintah daerah yang baik berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 67 yang berbunyi “Pemerintah daerah berkewajiban menerapkan prinsip dari tata pemerintahan yang baik dan bersih”. Dinas daerah yang merupakan salah satu perangkat daerah dalam penyelenggaraannya juga harus melaksanakan implementasi dari *good governance* tersebut.

Kinerja organisasi dapat dikatakan berhasil apabila organisasi tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian internal menjadi alat ukur keberhasilan kinerja. Selain penerapan *good governance*, sistem pengendalian internal juga menjadi salah satu faktor untuk menghasilkan kinerja yang baik pada dinas daerah. Sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah serangkaian tahapan yang integral pada tindakan dan aktivitas yang secara berkala oleh pimpinan dan karyawan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk menjaga aktivitas dinas daerah agar tetap terkendali, efektif, dan menjaga kinerja karyawannya. Berdasarkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),

sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pimpinan instansi dapat menjadi alat ukur keberhasilan kinerja.

Kinerja pegawai dalam suatu perangkat daerah dapat memudahkan pimpinan untuk menilai capaian strategi dengan mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target. Pengukuran kinerja pegawai juga dapat berfungsi sebagai *feedback* (umpan balik) yang dapat meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Pada penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai kinerja pegawai telah banyak dilakukan. Namun terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan karakteristik yang lebih spesifik pada subjek penelitian khususnya pada pegawai dinas daerah.

Motivasi dalam penelitian ini untuk menunjukkan pengaruh pengendalian internal dan penerapan *good governance* pada kinerja pegawai di sektor publik. Sesuai uraian diatas telah dijelaskan bahwa peranan sektor publik dalam pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat beberapa variabel terhadap kinerja pegawai masih bersifat tentatif, sehingga peneliti ingin menguji Kembali variabel yang belum menemukan konsisten pengaruhnya terhadap kinerja pegawai.

Implementasi dari *good governance* dan sistem pengendalian internal yang dilakukan secara bersamaan dapat mempengaruhi kinerja pada suatu organisasi. Penelitian yang menguji pengaruh *good governance* dan pengendalian internal

terhadap kinerja organisasi sektor publik salah satunya adalah Anggraini dan Idayati (2022) analisis kasus penelitian dilakukan pada penelitian tersebut menunjukkan hasil positif terhadap pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja organisasi pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)

Sumber penelitian lain yang menguji pengaruh pemahaman prinsip *good governance* dilakukan oleh Sutarsa (2023). Hasil utama dari penelitian tersebut menunjukkan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dinas pemerintah Kota Tasikmalaya. Meskipun tidak seluruh indikator dari *good governance* memiliki kategori sangat baik, beberapa indikator memiliki kategori baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heluka (2022) menjelaskan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian internal mempengaruhi kinerja instansi. Bentuk penelitian ini model survey dengan menggunakan kuesioner. *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi. Pengendalian internal dibutuhkan untuk memastikan kegiatan organisasi telah berjalan secara efisien dan tepat. Pada penelitian tersebut sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safrina (2022) yang menguji pengaruh *good corporate governance* pada kinerja pegawai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, sedangkan gaya kepemimpinan dan

budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh implementasi *good corporate governance* dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja organisasi sektor publik khususnya pada dinas daerah. Penerapan sistem pengendalian intern dan *good governance* pada dinas daerah masih jarang menjadi perhatian masyarakat. Adanya kendala-kendala secara internal maupun eksternal menjadi penghambat dalam penerapan sistem pengendalian intern dan *good governance*. Berkaitan dengan penjelasan tersebut maka peneliti ingin membuat penelitian berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui pengaruh implementasi *good governance* terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran mengenai pengaruh pengendalian internal dan implementasi *good governance* terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memahami mengenai pengendalian internal dan *good governance* yang selama ini peneliti dapat melalui jurnal, artikel, dan buku dan membandingkan dengan kenyataan yang diperoleh dari objek penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh sistem pengendalian intern dan implementasi *good governance* terhadap kinerja karyawan.